

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang fenomena atau program yang memfokuskan pada satu atau beberapa objek kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan dan selanjutnya mencoba untuk memberikan informasi (Widi, 2010:47). Dari uraian tersebut, fenomena atau program yang dianalisis adalah titik impas pajak terutang menurut kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini mengklasifikasikan tiga jenis UMKM berdasarkan omzet sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selanjutnya peneliti membandingkan titik impas pajak terutang untuk menentukan rugi tidaknya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Blitar.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di tiga UMKM yang berlokasi di Kabupaten Blitar Jawa Timur. Ketiga UMKM itu adalah Peternakan Ayam Petelur milik Lutfi Tontowi yang mewakili usaha mikro dan berlokasi di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Peternakan Ayam Petelur milik Mohammad Heru yang

mewakili usaha kecil dan berlokasi di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dan Peternakan Ayam Petelur Sigit Purnomo yang mewakili usaha menengah dan berlokasi di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain:

- a Peternakan Ayam Petelur tersebut sudah terdaftar di KPP Pratama Blitar sejak tahun 2012 (usaha mikro), 2009 (usaha kecil), 2008(usaha menengah).
- b Omzet 3 objek penelitian dapat diklasifikasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang membedakan jenis usaha berdasarkan omzet antara lain, omzet kurang dari sama dengan Rp 300 juta (usaha mikro), omzet lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar (usaha kecil), omzet lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 4,8 miliar (usaha menengah).
- c Peternakan tersebut memiliki dokumen atau catatan keuangan sehingga memenuhi kewajiban melakukan pencatatan sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- d UMKM Peternakan Ayam Petelur merupakan bagian dari penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Kabupaten Blitar sebesar 35,84% selama kurun waktu 2010-2014. Berdasarkan beberapa

alasan dan pertimbangan tersebut, ketiga UMKM diharapkan menjadi objek yang representatif untuk diteliti.

### 3.3 Jenis Data

Pada umumnya ada dua jenis sumber data, yakni data primer dan sekunder. Menurut Sekaran (2014: 113), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama, sedangkan data sekunder yakni data yang mengacu pada informasi berdasarkan sumber-sumber yang telah tersedia.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data. Berikut dalam Tabel 3.1 merupakan sumber data primer dalam penelitian ini:

**Tabel 3.1**  
**Sumber Data Primer**

No	Sumber Data	Bentuk Data	Tujuan
1	Wajib Pajak atas nama Lutfi Tontowi , Mohammad Heru, dan Sigit Purnomo	Wawancara terstruktur	Penentuan jenis Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, penentuan jenis usaha termasuk dalam kelompok usaha mikro, kecil atau menengah dan catatan keuangan Wajib Pajak pada tahun 2015
2	Indri, staf bagian umum dan kepegawaian Dinas Peternakan & Perikanan Kab. Blitar	Wawancara tidak terstruktur	Pengamatan lokasi penelitian
3	Staf bagian <i>help desk</i> KPP Pratama Blitar	Wawancara tidak terstruktur	Pelaksanaan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Sumber: Data yang diolah

2. Data sekunder, yaitu laporan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, buku perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan studi pustaka. Data sekunder ini dikumpulkan sebagai data pendukung data primer.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data primer maupun sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Observasi (Pengamatan)**

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi (Widi, 2010:236). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Pada tahap observasi, peneliti mencari informasi tentang peternakan ayam petelur kepada staf bagian umum dan kepegawaian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan lokasi objek penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu, peternakan ayam kategori usaha mikro, peternakan ayam kategori usaha kecil dan peternakan ayam kategori usaha menengah. Observasi dilakukan pada 6 dan 7 Juni 2017.

## 2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:316), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan dua metode wawancara, yaitu dengan menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

### a. Wawancara terstruktur

Menurut Sugiyono (2016:318), wawancara terstruktur menggunakan instrumen sebagai pedoman untuk wawancara. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, catatan, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

Wawancara dilakukan dengan menyusun terlebih dahulu *draft* wawancara sebagai pedoman. Wawancara ini dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah peternakan ayam petelur di Kabupaten Blitar. *Pertama*, peneliti melakukan wawancara kepada Sigit Purnomo sebagai pemilik usaha menengah pada 10 Juni 2017 (Lampiran 3). *Kedua*, peneliti melakukan wawancara kepada Lutfi Tontowi sebagai pemilik usaha mikro pada 11 Juni 2017 (Lampiran 1). *Ketiga*, peneliti melakukan wawancara kepada Mohammad Heru sebagai pemilik usaha kecil pada

11 Juni 2017 (Lampiran 2). Peneliti melakukan wawancara dengan tujuan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Wawancara Terstruktur**

Narasumber	Tujuan Melakukan Wawancara
Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Lutfi Tontowi sebagai pemilik usaha mikro	1. Memastikan klasifikasi objek termasuk kategori usaha mikro 2. Memperoleh gambaran umum objek penelitian 3. Memperoleh informasi berkaitan dengan kewajiban perpajakan 4. Memperoleh penjelasan dari dokumen/catatan keuangan 5. Memperoleh informasi tambahan selain yang tersedia dalam dokumen/catatan keuangan
Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Mohammad Heru sebagai pemilik usaha kecil	1. Memastikan klasifikasi objek termasuk kategori usaha kecil 2. Memperoleh gambaran umum objek penelitian 3. Memperoleh informasi berkaitan dengan kewajiban perpajakan 4. Memperoleh penjelasan dari dokumen/catatan keuangan 5. Memperoleh informasi tambahan selain yang tersedia dalam dokumen/catatan keuangan
Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Sigit Purnomo sebagai pemilik usaha menengah	1. Memastikan klasifikasi objek termasuk kategori usaha menengah 2. Memperoleh gambaran umum objek penelitian 3. Memperoleh informasi berkaitan dengan kewajiban perpajakan 4. Memperoleh penjelasan dari dokumen/catatan keuangan 5. Memperoleh informasi tambahan selain yang tersedia dalam dokumen/catatan keuangan

Sumber: Data yang diolah

b. Wawancara tidak terstruktur

Menurut Sugiyono (2016:318), wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti tidak berpedoman pada *draft* pertanyaan dan melakukan wawancara secara spontan. Wawancara jenis ini dilakukan kepada bagian *Help Desk* KPP Pratama Blitar pada 9 Mei 2017 untuk memperoleh informasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Wawancara terlampir dalam Lampiran 4.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:326), dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen pada penelitian ini adalah catatan keuangan tahun 2015 milik Lutfi Tontowi, Mohammad Heru, dan Sigit Purnomo sebagai pemilik UMKM Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Blitar yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak. Peneliti menggunakan catatan keuangan 2015 dikarenakan pada tahun tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah berlaku sekaligus ketersediaan catatan yang memadai. Catatan keuangan tersebut digunakan untuk menentukan pajak terutang dan analisis titik impas pajak terutang.

### 3.5 Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan suatu kesimpulan, data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan meneliti data-data (catatan keuangan dan hasil wawancara) yang telah terkumpul. Catatan keuangan dan hasil wawancara harus dapat mendeskripsikan jumlah omzet dalam tahun 2015 sebagai dasar menghitung pajak yang terutang.
- b. Mengkategorikan data-data (catatan keuangan dan hasil wawancara) yang disesuaikan dengan kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendataan. Ini dilakukan berdasarkan omzet antara lain sebesar kurang dari Rp 300 juta untuk usaha mikro, omzet sebesar Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar untuk usaha kecil, dan omzet sebesar lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 4,8 miliar untuk usaha menengah.
- c. Mengukur dan menghitung data yang tersedia:
  1. Menghitung pajak terutang Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ini seperti yang tercantum dalam Tabel 3.3 berikut ini:



**Tabel 3.3**  
**Pajak Terutang Berdasarkan**  
**Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

Peredaran Bruto	xxx	
Biaya-biaya	<u>xxx</u>	
Penghasilan Neto	xxx	
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib pajak	xxx	
Kawin	xxx	
Tanggungan	xxx	<u>xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	xxx	
Pajak Terutang		
Tarif pasal 17 UU PPh x PKP	xxx	
Jumlah Pajak terutang	xxx	

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008, diolah, 2017

2. Menghitung jumlah pajak terutang wajib pajak orang pribadi menggunakan tarif 1% dari omzet sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- d. Menganalisis perbandingan jumlah pajak terutang Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun sebagai dasar penentuan analisis titik impas pajak terutang. Analisis titik impas dilakukan berdasarkan kategori usaha UMKM yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menentukan pajak terutang yang berjumlah sama antara kedua aturan tersebut sehingga diperoleh kategori omzet usaha yang diuntungkan atau dirugikan.